

PERAN PENGAWASAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DPPKBPM) KOTA BANJARMASIN

Salwa, Iswiyati Rahayu, Fika Fibriyanita

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120316

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan,

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan,

E-mail : salwa.sall31@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Peran pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin, (2) faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan para pegawai yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan mempunyai peranan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan untuk mencegah hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan (2) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin adalah kualitas pegawai, kualitas pimpinan, motivasi yang dilakukan pimpinan terhadap pegawai, serta pemberian teguran dan hukuman.

Kata Kunci : Pengawasan pegawai, Kinerja pegawai

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine (1) the role of supervision in an effort to improve employee performance carried out at the Office of Population Control, Family Planning and Community Empowerment (DPPKBPM) Banjarmasin City, (2) what factors affect the implementation of supervision of employees carried out at the Office of Controlling Population, Family Planning and Community Empowerment (DPPKBPM) Banjarmasin City. The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data were collected by using observation, interview and documentation techniques. Data analysis uses three components, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that (1) Supervision has a role to improve employee performance in completing their duties, to correct errors that occur and to prevent obstacles and difficulties that may occur in the implementation of activities to achieve goals (2) Factors that can affect supervision in The Department of Population Control, Family Planning and Community Empowerment (DPPKBPM) Banjarmasin City is the quality of employees, the quality of leadership, the motivation of the leadership to employees, as well as giving warnings and punishments.

Keywords: employee supervision, employee performance

PENDAHULUAN

Dalam sebuah perusahaan swasta maupun pemerintah, manusia yang melakukan kewajiban dan komitmennya disebut pekerja atau pegawai. Pegawai adalah sumber daya apatur yang memiliki peran penting dalam membina struktur pemerintahan sebagai daya dorong utama kerangka tataan pemerintahan yang bekerja di dalam sistem kewajiban, kapasitas, dan tugasnya. Mengingat pentingnya kedudukan pegawai dalam suatu organisasi, maka dalam menjalankan tugasnya, pegawai yang mumpuni yang mampu dalam kapasitasnya, berkemauan keras, menghargai waktu, ketabahan yang tinggi terhadap perkumpulan, dapat melakukan komitmennya untuk kewajibannya lebih membantu kepentingan organisasai daripada kepentingan sendiri. Sebuah organisasi tentunya tidak membutuhkan pegawai yang berkerja seenak hati namun dirasa perlu membutuhkan pegawai yang bekerja terus-menerus diikuti dengan disposisi disiplin kerja yang tinggi. Untuk tetap memperhatikan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pegawainya agar tidak menyimpang dari pengaturan/ pedoman, diperlukan kegiatan yang sungguh-sungguh yaitu dengan adanya pengawasan.

Suatu penyimpangan didalam bidang kerja yang dilakukan oleh pegawai atau yang disebut dengan tindakan indisipliner merupakan hal yang pasti ada di dalam suatu organisasi, termasuk juga dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin. Pegawai yang hakikatnya adalah sebagai manusia yang tidak akan bisa lepas dari suatu kesalahan yang pernah dilakukan. Kesalahan-kesalahan inilah yang nantinya dapat diberikan perhatian lebih berupa pengawasan oleh atasan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meminimalisir terjadinya tindakan

indisipliner tentunya suatu tindakan indisipliner dalam suatu organisasi telah diatur sanksi-sanksinya sedemikian rupa agar pegawai diharapkan tidak akan melakukan tindakan tersebut. Akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut bukan berarti suatu organisasi dapat bersih dari tindakan indisipliner

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan suatu proses yang tidak terputus untuk menjaga agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengawasan berharap dapat menjamin bahwa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman yang telah dibuat agar apa yang dikerjakan dapat berjalan dengan produktif, serta pengawasan juga untuk mengoreksi kinerja pegawai agar lebih sistematis dan terlatih., terhindar dari penyimpangan, penyelawangan dan kebocoran. Pembinaan kinerja pegawai adalah usaha atau tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki, meningkatkan serta mengembangkan kinerja pegawai mulai dari peningkatan pengetahuan, keterampilan, kompetensi serta tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Rivai (2009:532) kinerja diartikan sebagai kesiapan individu atau kumpulan individu untuk menyelesaikan suatu tindakan, dan menyempurnakan yang ditunjukkan dengan tugasnya dengan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul Peran Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin guna mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan pegawai di DPPKBPM yang

bertujuan untuk mengetahui peranan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di dinas tersebut. Penelitian ini dilakukan agar dapat menjadi perbandingan dan tolak ukur mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di setiap organisasi yang lain untuk menerapkan pengawasan yang lebih baik lagi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana peran pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Kinerja Pegawai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peran pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor apasaja yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan para pegawai yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.

TINJAUAN PUSTAKA

• Definisi Pengawasan

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan

berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Menurut The Liang Gie (Atmodiwiryo) dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah pemeriksaan, mencocokkan dan mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.

Dari beberapa pengertian pengawasan yang digambarkan oleh para ahli, cenderung dianggap bahwa pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, difokuskan pada penilaian dan perubahan hasil yang dicapai. Selain itu, pengawasan juga dapat diibaratkan dengan Das Sollen (rencana) harus sesuai dengan Das Sein (kenyataan).

• Definisi Kinerja

Tika (2006:121) mendefinisikan kinerja sebagai hasil-hasil fungsi pekerjaan seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu Menurut Torang (2014:74) “Kinerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standard operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi.

Kinerja adalah hasil yang dicapai yang dilakukan oleh seorang pegawai atau perkumpulan pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan keahlian dan tugasnya masing-masing, dengan tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan secara sah, tidak menyalahgunakan hukum dan sesuai dengan etika dan moral.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah

hasil kerja selama periode tertentu dari segi kualitas dan kuantitas yang didasarkan oleh standar kerja yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja pegawai merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi atau menilai keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Penilaian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil kerja yang dicapai pegawai dengan standar pekerjaan. Bila hasil kerja yang memperoleh sampai atau melebihi standar pekerjaan dapat dikatakan kinerja seseorang pegawai termasuk pada kategori baik.

Demikian sebaliknya, seorang pegawai yang hasil pekerjaannya tidak mencapai standar pekerjaan termasuk pada kinerja yang tidak baik atau berkinerja rendah menurut Wilson Bangun (2012, p.231).

Peran pengawasan terhadap kinerja pegawai adalah sesuatu yang penting untuk difokuskan, untuk mencapai tujuan dan kemajuan organisasi yang harus dicapai dalam sebuah kontes. Ada beberapa Faktor yang harus dipertimbangkan dalam meningkatkan pelaksanaan kinerja pegawai yaitu faktor pengawasan, faktor kepemimpinan, dan faktor kompensasi untuk meningkatkan kemampuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memutuskan apakah pengawasan berperan signifikan terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

• Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif, metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif

sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Subjek ini biasanya didapatkan dari para partisipan atau responden. Dengan begitu, nantinya peneliti bakal berusaha menjawab bagaimana pengalaman sosio-kultural manusia dibentuk lalu memberinya makna. Objek penelitian kualitatif meliputi seluruh aspek atau bidang kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi olehnya

• Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Dengan metode deskriptif, sumber datanya adalah informan, tempat atau lokasi penelitian, arsip dan dokumen yang ditujukan untuk mengetahui apakah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kantor sudah

sesuai dengan yang diinginkan dan disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) yang alamiah. Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai peran pengawasan dalam meningkatkan kinerja pegawai.

- **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi adalah metode yang cukup mudah dilakukan untuk pengumpulan data. Penggunaan metode ini sangat dipengaruhi oleh interestnya sang peneliti. Observasi ini lebih banyak digunakan pada statistika survei, misalnya akan meneliti kelakuan orang-orang suku tertentu. observasi secara umum adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Metode pengamatan harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan informasi yang akurat. Kegiatan pengamatan yang dilakukan memiliki karakteristik tersendiri yaitu objektif, faktual dan sistematis. Pengertian observasi menurut Suharsimi adalah pengamatan langsung pada sebuah objek di lingkungan yang masih berlangsung atau dalam tahap kajian menggunakan panca indera. Tindakan observasi dilakukan secara sengaja dengan mematuhi aturan pengamatan yang berlaku.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian deskriptif kualitatif.

Wawancara adalah salah satu kaedah mengumpulkan data yang paling bisa digunakan dalam penelitian sosial. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian. Wawancara mengharuskan kedua belah pihak baik itu peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat. Untuk melakukan wawancara perlu adanya pembicara yang bisa disebut sebagai informan, Informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pimpinan DPPKBPM

- 2) Pegawai DPPKBPM

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya. Dengan kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu. Para ahli memberikan pengertian dokumentasi sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang memiliki keterkaitan dan keterangan yang dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau disebar. Oleh sebab itu, sehingga kemudian dokumen

tersebut sangat penting keberadaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengawasan

Suatu pengawasan merupakan tanggung jawab dan tugas seorang pimpinan untuk menyelenggarakan administrasi atau manajemen yang efektif dan efisien, pelaksanaan pengawasan dapat mencegah dan mengurangi secara lebih dini terjadinya berbagai kekurangan dan kelemahan aparatur pemerintah dalam melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam DPPKBPM kota banjarmasin, bentuk pengawasan yang digunakan adalah pengawasan intern dan ekstern baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikemukakan oleh H. Noor Wahyudi D, S. Sos selaku kasubag umum kepegawaian. "pengawasan yang dilakukan di DPPKBPM berupa pengawasan internal yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh inspektorat kota kepada pegawai DPPKBPM" Pengawasan Internal "intern" ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal "ekstern" ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam hal ini Henny Purnama Indah, S.E selaku pegawai DPPKBPM mengatakan bahwa : " Ada kegiatan yang memang harus diawasi secara langsung oleh pimpinan, namun ada juga yang dialihkan kepada sekretaris sehingga pegawai hanya perlu memberikan laporan tertulis" Henny Purnama Indah, S.E juga menambahkan bahwa "Selama covid-19 berlangsung pengawasan dilakukan menggunakan aplikasi yang memungkinkan para pegawai untuk melaporkan hasil kerja

yang dilakukan dari rumah" Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau mengawas dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat terhadap objek yang diawasi. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi lapangan, dan kegiatannya diawasi dari jarak jauh oleh pengawas. Biasanya pekerja yang berada di lapangan harus memberi laporan untuk pengawas, baik lisan ataupun tertulis agar pengawas bisa tetap melakukan pengawasan tanpa harus datang ke tempat.

Peran Pengawasan Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai

Peran pengawasan dalam organisasi adalah mengawasi sekaligus memperhatikan jalannya suatu organisasi, jika tidak ada pengawasan maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik, begitu juga pengawasan yang dilakukan di DPPKBPM memiliki peran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya
Dengan diadakan pengawasan pegawai maka para pegawai akan menjadi lebih baik dan fokus pada tanggung jawab yang dibebankan. Hal ini disampaikan oleh H. Noor Wahyudi D, S. Sos selaku kasubag umum kepegawaian DPPKBPM pada tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut: "Pengawasan itu mempunyai peranan yang penting. Hal itu harus dilakukan agar kinerja pegawai dapat meningkat. Jika tidak ada pengawasan di kantor ini, pasti keadaannya akan kacau"
- b. Untuk Memperbaiki Kesalahan- Kesalahan yang ada
Suatu kesalahan yang muncul dalam setiap pelaksanaan pekerjaan biasa terjadi. Apabila kesalahan tersebut tidak segera mendapatkan penanganan dikuatirkan dapat mengganggu kegiatan pencapaian tujuan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengawasan

pegawai. Hal ini diungkapkan oleh Henny Purnama Indah, S.E selaku pegawai dppkbpm dalam wawancara tanggal 23 Juni 2021 sebagai berikut: “Peranan pengawasan di kantor ini untuk mengevaluasi kesalahan yang terjadi, misalnya kurang disiplin dalam masuk kerjanya atau terlambat masuk, dan selalu memberi kabar atau izin ketika tidak masuk”

- c. Untuk mencegah hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi
Dalam pelaksanaan kegiatan tidak jarang terdapat hambatan dan kesulitan saat pelaksanaannya, untuk meminimalisir hal tersebut maka dilakukan pengawasan. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, dan rencana anggaran. Menurut Fitri Yarni, S.K.M selaku pegawai DPPKBPM dalam wawancara tanggal 23 Juni 2021 mengatakan “Penting melakukan pengawasan mengenai persiapan kegiatan agar tidak mengalami kesulitan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung, biasanya pengawasan dilakukan bersamaan dengan persiapan sebelum kegiatan berlangsung” Dari data di atas, kesimpulannya adalah pengawasan mempunyai peranan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan untuk mencegah hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan mencapai tujuan

KESIMPULAN & SARAN

• Kesimpulan

Pengawasan mempunyai peranan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi dan untuk mencegah hambatan dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan.mencapai tujuan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengawasan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin adalah kualitas pegawai, kualitas pimpinan, motivasi yang dilakukan pimpinan terhadap pegawai, serta pemberian teguran dan hukuman.

• Saran

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pengendalian Masyarakat (DPPKBPM) Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan cukup baik, namun yang perlu diperhatikan adalah kerjasama antar pimpinan dan pegawai yang sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai tersebut, kualitas pimpinan dan kualitas pegawai sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk menginstruksikan anggota timnya mengenai peran dan tanggung jawab mereka, sedangkan pegawai harus sadar akan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada mereka. Antara pimpinan dan pegawai harus adanya saling pengertian agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Choliq, 2020, Peran pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai
Dosen pendidikan 2, 2020, Pengawasan adalah
Ase Satria, 2016, Tujuan Dan Fungsi Pengawasan Menurut Para Ahli
Coki Siadari, 2015, Pengertian kinerja menurut para ahli
Asik belajar, 2016, Pendapat ahli tentang penilaian kinerja

- Geraldino A. Sayd, Frans Gana, Petrus Kase
(2016) “Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kualitas Kinerja
Kantor Pertanahan Rote Ndao”
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Volume 19, Nomor 3, Maret 2016
(264-274)
- Amiruddin (2016) “Fungsi Pengawasan
Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai Kantor Distrik Numfor
Timur Kabupaten Biak Numfor”
- Program Studi Ilmu Administrasi Institut
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yapis
Biak (Papua) Jurnal “Gema
Kampus” Ilmu Administrasi Edisi
Vol . XI Oktober 2016 Hal 11-17
- Jamaluddin, Risma Niswaty, M. Nippi
Tambe (2015) “Peranan Pengawasan
Dalam Meningkatkan Kinerja
Pegawai”
- Ad’ministrare, Vol. 2 No. 2, Juli –
Desember 2015 Hal 109-114
- Tomi Jaffisa, Abdul Kadir, Dumasari
Harahap (2017) “ Peranan Camat
dalam Pengawasan disiplin Pegawai
Negeri Sipil di Kantor Kecamatan”
- Jurnal Administrasi Publik Vol. 7 (2)
Desember 2017 Hal 94-106
- Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
- Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 64
tahun 2017 Tentang Uraian tugas
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Banjarmasin